



GITA SANG SURYA

Madah Persaudaraan Semesta



KETAHANAN PANGAN EKOLOGIS

DEMI KEUTUHAN CIPTAAN



GITA SANG SURYA

M a d a h P e r s a u d a r a a n S e m e s t a

4

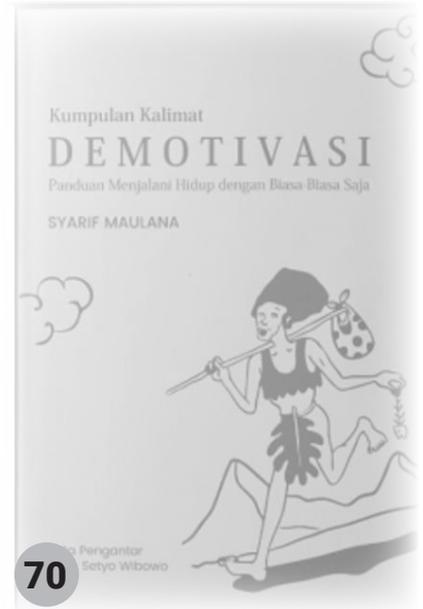


DARI TANAH MENUJU MEJA MAKAN: BERZIARAH MENUJU SISTEM PANGAN YANG ADIL

“Dalam sepiring makanan ini, aku melihat seluruh jagat raya mendukung keberadaanku,” Thich Nhat Hanh (Earth Gathas, 2004).

Penggalan kata-kata Nhat Hanh di atas mengungkapkan kesadarannya akan kompleksitas aspek yang termaktub dalam pembicaraan perihal pangan.

Baca lebih lanjut ... 4



“SELAMAT PAGI, SELAMAT MENJALANI HARI YANG ITU-ITU JUGA”

Satu untaian kalimat di atas bernada biasa, tetapi bukan sekedar biasa saja. Kalimat itu jelas kontras dari motivasi, sebut saja demotivasi namanya. Apa itu demotivasi? Secara singkat, demotivasi itu adalah kebalikan dari motivasi.

*Cover: Lucia Mona
Foto: Koleksi Pribadi
Desain cover: Luga Bonaventura OFM*

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1	Internasional	55
Editorial	2	Inspirasi	57
Antar Kita	3	Resensi	70
Gita Utama	4	Cerpen	73
Gita Utama	12	Puisi	77
Sosok	20	Refleksi	79
ASG	23	Wacana Fransiskan	84
Opini	29	Obral Ide	91
Nasional	45		

Diterbitkan oleh JPIC-OFM Provinsi St. Mikhael-Indonesia dan SKPKC Provinsi Fransiskus Duta Damai-Papua sebagai media animasi dan informasi dalam bidang *Justice, Peace and Integrity of Creation*.

Penanggung Jawab: Ketua Komisi JPIC-OFM Indonesia **Pemimpin Redaksi:** Alsis Goa Wonga OFM, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Fridus Derong OFM **Redaktur Pelaksana:** Yohanes Wahyu Prasetyo OFM **Redaksi:** Bimo Prakoso OFM, Rio Edison OFM, Oswaldus Co'o OFM, Valens Dulmin, Jhoni Dohut OFM, **Bendahara:** Cahaya Teguh **Sirkulasi:** Arief Rahman, **Lay Out:** Luga Bonaventura OFM.

Alamat Redaksi: JPIC-OFM, Jln. LetJend. Suprpto, No.80 Galur, Tanah Tinggi-Jakarta 10540 **HP (WA):** 081904101226

Redaksi menerima artikel-artikel, berita kegiatan, opini, refleksi, foto, karikatur, vignette dalam bidang JPIC (6000-6500 kata), kecuali puisi (boleh tema apa saja). Artikel-artikel berita akan diolah ulang oleh redaktur tanpa mengabaikan isi pokoknya. Artikel dapat dikirim melalui fax dan e-mail.

MICHAEL SANDEL: MENGAPA MERITOKRASI JADI RACUN DEMOKRASI?

Peter Tan

(Mahasiswa Magister Filsafat STF Driyarkara)

The populist backlash of recent years has been a revolt against the tyranny of merit, as it has been experienced by those who feel humiliated by meritocracy and by this entire political project. Kata-kata itu diucapkan filsuf politik AS, Michael Sandel ketika mengungkapkan pandangannya tentang reaksi populis di berbagai negara. Banyak negara sedang berada dalam kondisi yang disebut ahli demokrasi terkemuka, Larry Diamond, sebagai “masa resesi demokrasi.” Amerika, Venezuela, Inggris, Thailand, Turki, Hungaria, Polandia, Rusia, Indonesia, dan negara-negara lain yang pernah menjanjikan harapan demokratis, dalam berbagai tingkat, terjungkal ke jurang otoritarianisme. Selama empat dekade terakhir, demokrasi kita penuh dendam, frustrasi, kebencian dan kemarahan.

Mengapa demokrasi didera krisis dan reaksi populis? Sekurang-kurangnya, ada dua diagnosis yang tidak cukup dan kurang substansial. Diagnosis pertama, kemarahan populis terhadap elit terutama merupakan reaksi terhadap meningkatnya keragaman ras, etnis dan gender. Menurut diagnosis ini, kelompok yang marah merasa bahwa

dibandingkan dengan kaum perempuan, LGBT, atau kelompok minoritas, keadaan mereka jauh lebih buruk: mereka jadi korban nomor satu dari diskriminasi ekonomi, sosial dan politik.

Diagnosis kedua, mengaitkan kebencian kelas pekerja dengan kebingungan dan dislokasi yang ditimbulkan laju perubahan yang cepat di era globalisasi dan teknologi. Menurut diagnosis ini, banyak pekerja tidak mampu memenuhi tuntutan globalisasi dan teknologi, sementara pekerjaan yang biasa mereka lakukan telah beralih ke negara-negara berupah rendah atau dikerjakan robot. Kelompok yang mendambakan karir masa lalu ini merasa terkilir menghadapi perubahan sedemikian canggih. Ini membangkitkan kemarahan mereka terhadap imigran, kosmopolitanisme, keterbukaan batas-batas negara, perdagangan bebas dan elit pemerintahan.

Dua diagnosis ini tidak cukup dan gagal menyingkap soal yang lebih substansial. Menafsirkan protes populis sebagai jahat atau salah arah, atau semata-mata sebagai sentimen picik terhadap multikulturalisme dan globalisasi, dapat

membebaskan elit pemerintah dari tanggung jawab politis dan moral mereka: bahwa krisis ini adalah buah kegagalan politik progresif dan disorientasi partai-partai sosial-demokrat yang membelot dari keadilan sosial lalu jatuh ke pelukan neo-liberalisme. Ini membuat demokrasi kita tak luput dari moncong oligarki.

Berbeda dari dua diagnosis itu, Sandel menawarkan perspektif baru. Tesis utama Sandel adalah krisis demokrasi berakar pada ideologi meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Mengapa dia jadi racun demokrasi? Apa relevansinya di Indonesia? Dengan berpegang pada tesis Sandel, saya keberatan dengan gagasan bahwa populisme sayap kanan muncul semata-mata karena sentimen rasisme, xenofobia, anti-multikulturalisme dan anti-globalisasi. Asumsi ini cenderung menyalahkan reaksi populis dan membebaskan para elit politik dari vonis bersalah atas krisis demokrasi ini.

Komunitarisme Michael Sandel

Michael Sandel lahir 1953 di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Selain sebagai dosen filsafat politik di Harvard, dia juga seorang filsuf politik

paling berpengaruh saat ini. Sandel dilukiskan sebagai *global profile of rockstar*. Dia juga disebut sebagai *the celebrity political philosopher* (filsuf politik selebriti). Kuliah-kuliahnya tentang keadilan tersebar di Youtube, dan viewers-nya mencapai puluhan juta. Karyanya sangat banyak, di antaranya: *Liberalism and the Limit of Justice, Public Philosophy, Democracy's Discontent: America in Search of Public Philosophy, The Tyranny of Merit*.

Sandel sering disebut filsuf komunitarian, walaupun mengaku keberatan dengan label itu. Komunitarisme adalah sebuah mazhab filsafat yang dicetuskan sekelompok pemikir Anglosakson. Mereka mengajukan kritik terhadap teori kontrak sosial yang dikembangkan John Rawls dan liberalisme pada umumnya. Perdebatan komunitarianisme dan liberalisme dimulai pada tahun 1980 dan berkembang dengan cepat. Amitai Etzioni, peletak dasar komunitarisme kontemporer berpendapat, banyak perilaku sosial ditopang jaringan informal ikatan sosial dan oleh suara moral komunitas (keluarga, agama, tradisi, dll). Dalam menghadapi kehancuran masyarakat kontemporer akibat paham-paham individualistik liberal dan perkembangan neoliberalisme, dibutuhkan "ikatan moral masyarakat" yang semakin kuat. Charles Taylor berpendapat, modernitas dalam wajah liberal telah melupakan

akar, substansi dan sumber kehidupannya. MacIntyre berpandangan, pandangan moral liberal modern yang mengusung ide-ide seperti netralitas, keadilan prosedural dan ketakberpihakan negara dibangun di atas landasan rapuh yang disebut "bencana moral". Meski tak seradikal MacIntyre dalam menolak liberalisme, Walzer berpendapat, masyarakat demokratis membutuhkan sebuah teori keadilan yang tidak memiliki tendensi penyeragaman seperti liberalisme, tapi menekankan diversitas ranah-
ranah kehidupan. Secara filosofis, kaum komunitarian mendasarkan pemikirannya pada Aristoteles, Aquinas, Hegel, dan Tocqueville.

Meskipun posisi kaum komunitarian berbeda-beda, fokus kritik mereka sama yaitu pada sifat liberalisme yang terlalu individualistik, sambil menekankan pentingnya tuntutan etis dan pandangan hidup bersama. Atau menurut Sandel: "Para pemikir komunitarian menantang etika berbasis hak dengan pandangan yang lebih penuh tentang kewarganegaraan dan komunitas." Tesis pokok pemikiran komunitarian dapat dirumuskan sebagai berikut: Kaum komunitarian berpendapat, liberalisme merusak komunitas yang merupakan unsur penting kehidupan yang baik; liberalisme tidak mempertimbangkan pentingnya

kewajiban dan komitmen yang tidak dipilih individu; liberalisme menyodorkan konsep diri yang cacat, individualistik dan abstrak; alih-alih netral, klaim-klaim liberal pada ujungnya melahirkan teori yang tidak netral di antara berbagai konsepsi kebaikan yang saling bersaing.

Bersama para filsuf komunitarian, Sandel menggarisbawahi kekurangan filsafat politik Rawls dan menekankan pentingnya tuntutan etis dan pandangan hidup bersama. Sandel berpendapat, demokrasi membutuhkan kebangkitan kembali tradisi republik untuk menangkal efek korosif liberalisme kontemporer dan tirani pasar. Sandel berupaya menghidupkan lagi aspek-aspek republikanisme yang telah dihancurkan liberalisme berbasis hak dalam filsafat publik Amerika.

Fokus kritik Sandel terhadap Rawls bukan apakah hak dan keadilan penting atau tidak, melainkan apakah hak dan keadilan bisa dijustifikasi dalam sebuah cara yang tidak mengandaikan konsep tertentu tentang kebaikan. Dengan kata lain, isu yang diuraikan Sandel bukan apakah klaim-klaim individu atau komunal yang memiliki bobot lebih besar, melainkan "apakah prinsip keadilan yang menuntun struktur dasar suatu masyarakat dapat bersifat netral dari respek terhadap keyakinan religius, etis dan

moral yang dimiliki warganya.” Sandel tidak menolak hak-hak individual. Yang ditolak Sandel adalah klaim Rawls bahwa hak-hak individual dipertahankan dengan tidak mengacu kepada konsep partikular apapun tentang kehidupan yang baik.”

Itu berarti, sasaran kritik Sandel adalah “liberalisme prosedural” yang menonjol dalam dunia akademis dan praktek politik saat ini. Secara politis, liberalisme prosedural adalah keyakinan bahwa “negara harus netral terhadap konsep hidup baik”, sehingga demokrasi liberal dikosongkan dari argumen moral dan menjadi demokrasi berwajah teknokratik. Secara filosofis/akademis, liberalisme prosedural menekankan “prioritas hak atas konsep hidup baik”.

Sandel tetap mempertahankan nilai-nilai liberal seperti toleransi, kebebasan berekspresi, kebebasan individual, perlindungan individu dari totalitarisme negara. Itulah sebabnya, Sandel menentang hirarki dan tradisi. Yang dikritik Sandel ialah posisi liberalisme yang kurang menghargai aspek-aspek sosial individu dan hak-hak kolektif. Kritik Sandel didasarkan pada ketertarikannya untuk memahami bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan meskipun mereka memiliki perbedaan opini dan nilai-nilai tentang apa itu hidup yang baik.

Dalam *A Theory of Justice*, dengan merujuk pada Kant, tesis utama Rawls adalah etika politik tidak dapat berpijak pada konsep kebahagiaan

atau hidup baik. Alasannya sederhana: konsep hidup baik selalu bersifat partikular, kebetulan dan tak dapat diberi pendasaran universal. Tidak pernah bisa disepakati satu versi kebahagiaan atau tujuan akhir di antara berbagai cara orang hidup bahagia atau di antara berbagai preferensi individual. Tugas politik menurut Rawls bukanlah menentukan model kebahagiaan dan tujuan akhir yang harus dicapai warga negara melainkan hanya memberikan “aturan main” agar kebebasan yang satu tidak memangsa kebebasan yang lain. Di sini, negara menciptakan “prosedur yang fair” agar tidak terjadi apa yang disebut Hobbes sebagai *bellum omnium contra omnes*—perang semua melawan semua.

Dengan kata lain, keutamaan keadilan menurut Rawls menggambarkan tidak hanya prioritas moral tetapi juga sebagai bentuk justifikasi yang istimewa; bahwa hak mendahului kebaikan, tidak hanya dalam klaimnya tetapi juga karena prinsip-prinsipnya diturunkan secara independen. Masyarakat yang adil tidak berupaya mempromosikan tujuan tertentu tetapi memungkinkan warganya mengejar tujuan mereka sendiri, konsisten dengan kebebasan yang sama untuk semua. Oleh karena itu, masyarakat harus diatur oleh prinsip-prinsip yang tidak mengandaikan konsep tertentu tentang kebaikan. Apa



yang membuat masyarakat adil adalah bahwa setiap orang berhak memilih tujuannya sendiri, terlepas dari telos bersama. Di sini, sebagaimana hak mendahului kebaikan, demikian subjek mendahului tujuan-tujuannya. Dengan demikian, seorang liberal kehilangan klaim moral yang mengikatnya bersama individu lainnya untuk mengejar tujuan bersama.

Rawls merumuskan dua prinsip pokok keadilan yaitu prinsip kesamaan/egalitarianisme dan prinsip perbedaan. Prinsip kesamaan berbunyi: setiap orang, siapapun, memiliki kebebasan dasar yang sama luasnya seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul atau mengikuti hati nurani. Setiap orang juga memiliki peluang setara dalam mengejar posisi-posisi strategis di dalam masyarakat. Namun, Rawls tidak menganut egalitarianisme radikal. Agar keadilan dapat diwujudkan dalam kondisi ketimpangan ekonomi, Rawls menyodorkan prinsip perbedaan yang tesis utamanya ialah menghendaki supaya suatu sistem politik dan sosial juga menguntungkan orang-orang yang kurang beruntung. Menurut pendapat ini, *income* yang lebih besar dari kelas sosial yang lebih tinggi hanya disebut adil jika *income* tersebut memberikan keuntungan bagi mereka yang kurang beruntung, misalnya lewat pajak progresif. Namun, pertanyaan untuk Rawls ialah apa yang menjamin dan

mewajibkan saya sebagai subjek liberal yang atomistik harus berbagi dengan subjek atomistik lainnya? Jika saya hanya memiliki hak untuk mengejar tujuan akhir saya, maka saya tidak memiliki tanggung jawab moral apapun untuk meringankan beban orang lain. Menurut Sandel, ini menunjukkan, prinsip perbedaan Rawls membutuhkan basis moral yang lebih kuat dari sekadar antropologi liberal yang atomistik.

Agar adil, kedua prinsip ini mesti disepakati dalam "posisi asli". Maksud posisi asli kira-kira dapat digambarkan sebagai berikut: "Andaikan ketika kita berkumpul memilih prinsip-prinsip [yang mengatur masyarakat kita dengan adil], kita tidak tahu kita akan jadi orang seperti apa nanti dalam masyarakat. Bayangkan bahwa kita memilih di balik "selubung ketidaktahuan" untuk mencegah kita mengetahui apapun tentang siapa kita sebenarnya. Kita tidak tahu kelas kita dalam masyarakat, jenis kelamin, ras atau etnis kita, opini politik atau agama kita. Kita juga tidak tahu kelebihan dan kekurangan kita-entah kita sehat atau sakit, berpendidikan tinggi atau putus sekolah, lahir dari keluarga yang mapan atau keluarga yang hancur. Ketika kita tidak tahu hal-hal ini, kita akan memilih posisi asli dari sebuah kesetaraan. Karena tidak ada yang akan melakukan tawar-menawar posisi yang unggul,

prinsip-prinsip yang akan kita sepakati akan adil."

Sandel berpendapat, gambaran tentang posisi asli adalah lukisan sesungguhnya tentang unencumbered-self. Unencumbered-self adalah diri yang melayang-layang dalam ruang-ruang kebebasan, tidak terbebani oleh nilai-nilai komunitas, atribut sosial, tujuan formatif, proyek politik kebaikan bersama, dan kalkulus kepentingan sosial. Suatu konsep individu yang bahkan sudah ada sejak cogito Descartes di gerbang filsafat pencerahan pada abad ke-17. Descartes memahami kesadaran manusia sebagai kesadaran universal, manusia sebagai "aku yang berpikir". Cogito adalah individu abstrak. Dia bukan anggota Gereja, umat agama, bukan laki-laki, gay, juga bukan anggota partai melainkan diri yang sangat umum yang menyamakan semua manusia yaitu kesadaran rasionalnya. Dalam pandangan liberal, hak-hak individu dijamin oleh negara di mana hak-hak itu tidak tunduk pada kalkulus kepentingan bersama, melainkan berfungsi sebagai kartu truf bagi individu dalam mengejar tujuannya sendiri.

Apa implikasi politis pandangan liberal tersebut? Sandel berpendapat, implikasi politisnya ialah kita kehilangan filsafat publik yang merumuskan diskursus publik yang kuat secara moral. Jika tunduk di bawah logika

liberalisme, konsep tentang tujuan bersama dan hak-hak kolektif mesti digeser oleh konsep “prosedur yang fair”. Sandel melihat kecenderungan bahwa pada akhir abad ke-20 hingga saat ini, baik di Amerika maupun banyak negara lain di dunia, terjadi pergeseran dari filsafat publik yang merumuskan tujuan bersama dengan diskursus moral yang kuat kepada persoalan prosedur yang fair, dari politik kebaikan kepada politik hak, dan dari republik nasional kepada republik prosedural. Akibatnya, politik menjadi urusan segelintir teknokrat yang dianggap lebih ahli dalam menangani masalah publik, sedangkan peran luas masyarakat tidak diberi ruang. Politik teknoratis liberal ini meminimalisir partisipasi publik yang luas dan menciptakan rezim tiranis bernama demokrasi tanpa demos.

Dengan demikian, konsep diri yang dibangun di atas hak individu tidak cukup untuk memberikan basis

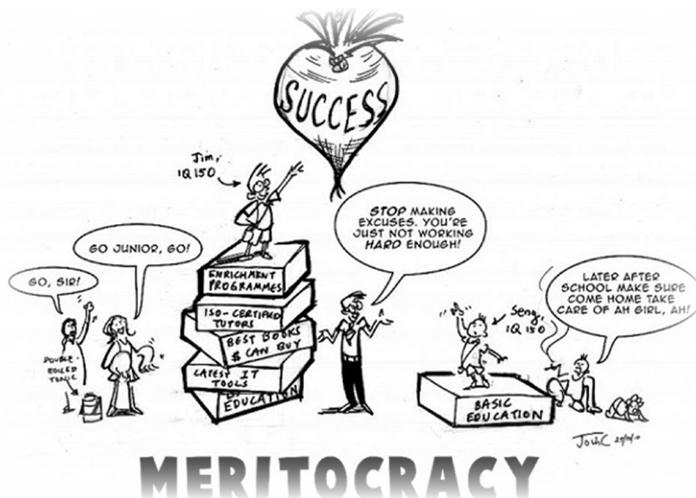
legitimasi bagi komitmen moral dan keterlibatan warga di dalam *welfare state*. Bagi Sandel, individu liberal sendiri terhempas di dua sisi berlawanan: di satu sisi, lewat pemilihan umum dan lembaga peradilan misalnya, hak-haknya di dalam demokrasi diberi prioritas melampaui segala pandangan politik. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, banyak orang merasa tidak berdaya sebab negara yang omnipotent justru tunduk di bawah korporasi. Hilangnya nilai-nilai bersama dan identitas kolektif di bawah desakan emansipasi individu liberal justru melucuti otonomi warga negara ketika negara tak berdaya di hadapan korporasi. Alih-alih bebas, individu liberal yang terasing dari ikatan sosial ini (*unencumbered-self*) terperangkap jaring-jaring kuasa neo-liberal yang tak terkekang. Kritik Sandel terhadap kolonialisasi pasar dan neoliberalisme tak terkekang menunjukkan dirinya seorang Marxian.

Politik kita yang makin teknokratik juga kehilangan tujuannya untuk menyediakan kebaikan bersama dan keadilan sosial ketika lembaga-lembaga negara beternak oligarki dan partai-partai politik menjadi kaki tangan neo-liberal. Negara lemah yang empuk di moncong oligarki ini menyebabkan demokratisasi gagal menghasilkan “kesamaan kondisi-kondisi” (*Tocqueville*) dan malah mempertajam ketidaksamaan- ketidaksamaan baru. Keadaan ini membuat demokrasi kita penuh dendam, kemarahan, frustrasi dan kekecewaan yang berpuncak pada pecahnya reaksi-reaksi populis menandai krisis demokrasi dewasa ini.

Tirani Meritokrasi

Mempertajam kritik tersebut, Sandel menyusun sebuah gagasan baru dalam buku terbarunya, *The Tyranny of Merit* (2020). Dalam buku ini, Sandel mengajukan sebuah tesis penting bahwa krisis demokrasi dan serangan populis berakar pada “ideologi meritokrasi”.

Istilah “meritokrasi” diperkenalkan pertama kali oleh seorang sosiolog Inggris, Michael Young, dalam karyanya, *The Rise of Meritocracy 1870-2033* (1958). Menurutnya, meritokrasi adalah keyakinan bahwa prestasi individual seseorang adalah ujung tombak demokrasi dan kemajuan sosial; atau suatu masyarakat yang diperintahkan oleh suatu pemerintahan dari



orang-orang yang dipilih atas dasar prestasi (*merit*) dan kemampuannya.

Young menemukan paradoks meritokrasi. Di satu sisi, prinsip prestasi adalah jalan keluar merebut kesetaraan dari bahaya nepotisme dan feodalisme. Young menggambarkan, dalam masyarakat agrikultural (*pra-modern*), status dan jabatan publik tidak ditentukan oleh prestasi, melainkan oleh kelahiran. Karena itu, mobilitas sosial dari bawah ke atas mustahil. Meritokrasi, karena itu, membawa revolusi sosial, dan karena itu sesuai dengan demokrasi. Di sisi lain, prinsip meritokrasi tidak lebih baik daripada feodalisme masyarakat *pra-modern*. Dia melihat sejumlah fakta sosial: dalam masyarakat industri modern yang dikuasai kekuatan kapitalistik, posisi sosial dan kekayaan berperan penting bagi prestasi seseorang. "Sungguh menakjubkan," tulis Young, "berapa banyak dokter adalah anak-anak dokter, berapa banyak pengacara adalah anak-anak pengacara, begitupun dengan berbagai profesi strategis lainnya. Dalam era industri dan perdagangan ini, orang-orang sukses dengan mudah mengirim anak-anak mereka ke profesi terpandang, melalui prestasi mereka, sama seperti melalui kelahiran dalam masyarakat feodal."

Pendapat Young tentang sisi gelap meritokrasi tersebut, secara sederhana

dapat dirumuskan sebagai berikut: Benar bahwa prestasi mengatasi masalah ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat feodal. Namun prestasi seseorang dalam sistem ekonomi dan pendidikan yang menuntut kekayaan (uang) di era kapitalisme modern justru menimbulkan ketidaksetaraan baru. Anak-anak dari keluarga miskin, meskipun bekerja keras, disiplin dan pintar, jika mereka tidak bisa mengakses pendidikan yang baik di sekolah-sekolah elit yang mahal, mereka akan tetap merayap pada posisi yang diwariskan orangtua dan nenek moyang mereka. Sedangkan, anak-anak dari keluarga kaya akan dengan mudah mengakses pendidikan elit dan mahal, mengikuti berbagai kursus, kelas-kelas pengembangan diri, pendidikan dan pelatihan yang menuntut biaya mahal. Jadi, saya melihat, pada intinya Young sepakat bahwa pendidikan menghapus feodalisme lama dan membawa revolusi sosial, tapi prinsip meritokrasi menciptakan ketidakadilan dan jenis "feodalisme" baru persis ketika pendidikan menjadi arena persaingan kelas sosial.

Sandel sepakat dengan Young bahwa meritokrasi paradoksal. Di satu sisi, meritokrasi adalah sebuah prinsip yang memungkinkan setiap orang memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka dengan mengasah bakat dan kemampuan mereka. Dengan

kalimat lain, bertentangan dengan aristokrasi masyarakat feodal, meritokrasi menjanjikan posisi-posisi yang setara bagi semua orang yang dicapai berdasarkan usaha individu. Di sisi lain, di era globalisasi pasar bebas dan neo-liberalisme tak terkendali, meritokrasi tidak menghapus ketidaksetaraan, malah mempertajamnya. "Selama setengah abad terakhir," tulis Sandel, "meritokrasi membuka hambatan ras, agama, gender dan etnisitas, tetapi hari ini telah mengeras menjadi aristokrasi turun-temurun." Meski bertentangan dengan demokrasi yang dicintai seluruh masyarakat liberal, mengejutkan bahwa lebih dari empat dekade, asumsi-asumsi meritokratis mempertajam pengaruhnya di ruang publik.

Sandel mengawali analisisnya tentang meritokrasi dengan menunjukkan dugaan atau keyakinan umum masyarakat liberal Amerika dan para politisi partai Demokrat bahwa kesenjangan politik yang penting saat ini bukan lagi kiri versus kanan, melainkan terbuka versus tertutup. Di dunia terbuka, prestasi individual, yang diperoleh melalui pendidikan di universitas, adalah kunci menjawab tuntutan globalisasi. Maka dalam masyarakat liberal, semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengejar prestasi tersebut dan pemerintah memberikan kesempatan setara bagi siapapun untuk mengenyam

pendidikan universitas. Jika kebebasan dan peluang yang fair disediakan secara sama kepada semua orang [prinsip kesamaan Rawls], maka kesuksesan/prestasi seseorang dianggap sebagai hasil usahanya sendiri. Sebaliknya, mereka yang tertinggal dan gagal jelas salah sendiri.

Bagi Sandel, meskipun benar bahwa prestasi individual mencerminkan kerja keras dan dedikasi pribadi, namun pandangan bahwa prestasi individual semata-mata usaha sendiri, terlepas dari peran komunitas dan kolektif adalah pandangan sesat, yang basis filosofisnya ditemukan pada gagasan unencumberedself liberal di atas. Karena itu, Sandel menilai meritokrasi tidak lebih dari sebuah ideologi yaitu kesadaran palsu (Marx) yang membuat masyarakat liberal Amerika percaya, prestasi individu adalah segalanya. Sandel tidak mengatakan prestasi tidak penting. Yang dikoreksi Sandel adalah keyakinan gigih bahwa prestasi individu menentukan prestasi sosial, pendapatan dan kesejahteraan. Dengan kata lain, yang dikritik Sandel adalah *the tyranny of merit*, pandangan bahwa prestasi individu menentukan segalanya: kemajuan sosial, kesejahteraan, pendapatan, bahkan penentu eksistensi dan identitas manusia modern.

Jika meritokrasi memberi keyakinan bahwa orang yang menghasilkan banyak dan

bekerja lebih keras pantas mendapatkan banyak, maka pertanyaan Sandel adalah di manakah masyarakat yang sungguh-sungguh ditata menurut prinsip meritokrasi? Bukankah dalam kenyataan terdapat sejumlah orang kaya yang menghasilkan sedikit dan tidak bekerja keras tetapi mendapatkan banyak, dan orang miskin yang menghasilkan banyak dan sungguh bekerja keras tetapi mendapatkan sedikit? Menurut Sandel, prinsip kerja keras, bakat, talenta dan retorika kesempatan kurang tepat sebab dalam kenyataan orang-orang Amerika yang lahir dari keluarga miskin, sekalipun berbakat, bertalenta dan bekerja keras, tetap menjadi miskin sampai dewasa.

Sistem ekonomi merupakan sistem sosial yang paling dekat dengan meritokrasi, misalnya pandangan mainstream bahwa di bursa pasar kerja hanya orang berprestasi yang dapat bertahan. Sandel mengajukan pertanyaan, apa persis yang dihasilkan oleh para bankir atau komisaris BUMN yang dibayar dengan gaji paling tinggi? Jika gaji dibayar berdasarkan prestasi, apa persis substansi prestasi tersebut? Mengapa seorang perawat yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan pasien Covid-19 justru dibayar dengan upah yang rendah? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Sandel memperlihatkan bahwa meritokrasi tak lebih dari sebuah kesadaran palsu.

Bagi Sandel, ideologi ini menghancurkan solidaritas, merusak demokrasi, dan membuang mimpi tentang kesejahteraan bersama.

Gagasan Sandel tentang aspek ideologis prinsip meritokrasi dalam praktek politik progresif liberal dapat dinyatakan dalam beberapa tesis afirmatif berikut. *Pertama*, inti keyakinan dan etika meritokratis adalah pandangan bahwa nasib kita menggambarkan prestasi atau jasa kita, kita bertanggung jawab atas nasib kita dan pantas mendapatkan apa yang kita dapatkan. Dengan keyakinan ini, menurut Sandel, "kelompok elit dalam masyarakat yang tidak setara percaya bahwa kesuksesan mereka dibenarkan secara moral sebagai hasil kerja keras mereka." Sebaliknya, mereka yang merayap bertanggung jawab atas kegagalan dan ketertinggalan mereka sendiri. Terhadap keyakinan ini, Sandel mengajukan sejumlah pertanyaan: jika kesuksesan adalah hasil kerja keras pribadi, bagaimana dengan orangtua dan guru yang membantu mereka dalam perjalanan merebut prestasi tersebut? Bagaimana dengan bakat dan karunia yang tidak sepenuhnya diciptakan oleh mereka sendiri? Bagaimana dengan lingkungan atau masyarakat yang memupuk dan menghargai bakat yang mereka miliki? Bagaimana dengan sistem sosial, ekonomi dan pendidikan yang menguntungkan mereka? Dan

jika kegagalan adalah tanggung jawab pribadi, bagaimana dengan mereka yang telah bekerja keras sepanjang hidup tapi tetap gagal mengubah nasib dan malah semakin terbenam dalam kemiskinan dan ketertinggalan?

Atas dasar keyakinan ini, para elit politik menghadapi problem ketidaksetaraan beberapa dekade terakhir dengan menawarkan argumen liberal tentang perluasan kesamaan peluang dan retorika mobilitas ke atas sehingga orang mampu bangkit dari situasi mereka. Tapi argumen ini buta terhadap kenyataan bahwa sistem ekonomi global hanya menguntungkan mereka yang di atas dan membuat kelompok yang merayap di bawah semakin tenggelam dalam ketertinggalan mereka. Dalam globalisasi ekonomi saat ini, tidak mudah untuk bangkit. Orang Amerika yang lahir dari keluarga miskin cenderung tetap miskin sampai dewasa meski mereka telah bekerja keras. Dari mereka yang lahir di peringkat kelima terbawah dalam skala pendapatan, hanya satu yang bisa menggerakkan nasibnya ke peringkat kelima teratas. Sebagian besar bahkan tidak naik ke kelas menengah. Sandel berpendapat, lebih mudah untuk bangkit dari kemiskinan di Kanada, Jerman, Denmark, dan negara-negara Eropa lainnya daripada di Amerika Serikat. 70% persen orang Amerika percaya orang miskin bisa keluar dari kemiskinan,

sementara hanya 35% orang Eropa yang berpikir begitu. Keyakinan pada mobilitas naik ini menjelaskan mengapa Amerika Serikat menjadi negara kesejahteraan yang kurang dermawan dan solid dibandingkan kebanyakan negara Eropa. Keyakinan ini juga menjelaskan masyarakat Amerika percaya bahwa kerja keras membawa sukses, dan takdir ada di tangan kita sendiri. Berdasarkan survei-survei opini publik global, 77% orang Amerika percaya orang dapat berhasil jika mereka bekerja keras; hanya separuh orang Jerman yang berpikir begitu. Di Prancis dan Jepang, mayoritas mengatakan bahwa kerja keras bukan jaminan kesuksesan. Alih-alih demi kesetaraan, keyakinan meritokratis ini malah mempertajam ketidaksetaraan dan polarisasi serta merusak demokrasi sebab kita semakin sulit membayangkan diri kita berada pada posisi orang lain. Keyakinan ini juga bertanggung jawab terhadap semburan kebencian di antara mereka yang kalah dan tertekan.

Kedua, keyakinan meritokratis memengaruhi cara menghadapi ketimpangan sosial. Dalam kaca mata paradigma meritokrasi, penjelasan atas fakta ketimpangan sangat sederhana yaitu karena ada orang yang menghasilkan banyak dan yang lain menghasilkan sedikit. Namun Sandel berpendapat pandangan ini menyederhanakan soal sebenarnya yaitu tidak ada

hubungan linear antara kerja keras, bakat, dan kemampuan dengan hasil. Sebagian besar apa yang kita hasilkan saat ini ditentukan dan dihargai oleh sistem pasar, bukan oleh martabat pekerjaan dan nilai kerja keras kita. Secara moral sulit untuk menjelaskan mengapa sebagian orang pantas mendapatkan imbalan yang lebih besar dari sistem pasar daripada sebagian lainnya yang mungkin sama-sama pekerja keras tetapi kurang diberikan harga yang seimbang dengan kerja keras mereka oleh masyarakat pasar. Seorang petani kopi di Manggarai bekerja keras setiap hari sepanjang tahun. Dia menghasilkan biji kopi berkualitas dalam jumlah banyak, tapi bukan dia yang kaya melainkan para pengusaha kopi di Surabaya, misalnya. Bagi Sandel, ini menunjukkan, ketimpangan bukan masalah seberapa besar penghasilan dan prestasi kita, melainkan soal penghargaan timpang terhadap nilai kerja keras dan martabat pekerjaan.

Bagi Sandel, ideologi meritokrasi menjadi racun hidup bersama: 1) Dalam kondisi ketimpangan struktural yang merajalela dan mobilitas ke atas yang terhenti, mengulangi pesan bahwa kita bertanggung jawab atas nasib kita dan dapat mengubah keadaan asalkan terus bekerja keras hanya menciptakan frustrasi dan ketidakpuasan bagi mereka yang percaya pada janji meritokratis untuk

bekerja keras sepanjang waktu tapi masih tetap tertinggal dan miskin. Keyakinan ini juga mengikis solidaritas, membenarkan demoralisasi yang ditimpakan globalisasi, serta mengamankan posisi elit politik dan para pemenang persaingan ekonomi global; 2) Bersikeras bahwa kunci menghadapi ketidaksetaraan adalah meningkatkan akses ke universitas atau mendapatkan gelar sarjana hanya akan merendahkan mereka yang tidak bisa mengenyam pendidikan universitas serta merusak martabat pekerjaan; 3) Bersikeras bahwa masalah sosial dan politik hanya bisa diselesaikan para ahli berpendidikan dan teknokrat adalah keangkuhan meritokratis yang merusak demokrasi dan partisipasi sipil yang lebih luas.

Saya berpendapat, kritik Sandel membongkar kesadaran palsu meritokrasi dalam dua hal: 1) Meritokrasi memalingkan kita dari sistem dan struktur sebagai penyebab utama ketimpangan dan ketidaksetaraan. Ini sama dengan kritik Marx terhadap agama. Baik meritokrasi dalam kritik Sandel maupun agama dalam kritik Marx, memanipulasi kebenaran sesungguhnya dengan etika kesuksesan individual atau gagasan teologis tentang kemiskinan sebagai rahmat (agama). Ini mengasingkan kesadaran kritis kita dari struktur ekonomi dan politik yang timpang. Bedanya, bagi

Marx, agama adalah candu bagi orang miskin, sedangkan bagi Sandel, meritokrasi adalah candu bagi orang kaya; 2) Keduanya- agama dalam kritik Marx dan meritokrasi dalam kritik Sandel- mendesak fatalisme atau sikap menyerah pada nasib. Baik meritokrasi maupun agama menganggap nasib manusia (kaya atau miskin, mulia atau hina) sebagai takdir yang harus diterima. Dari sudut pandang teologi tradisional, kemiskinan adalah kehendak Allah dan harus diterima sebagai keniscayaan. Dari perspektif meritokrasi, kemiskinan sepenuhnya adalah kesalahan orang-orang miskin sendiri. Tentu saja, meritokrasi sangat sekular dalam arti bukan kehendak Tuhan orang jadi miskin dan gagal, atau kaya dan sukses, melainkan karena kegagalan atau prestasi sendiri. Namun, efek dua pandangan ini sama: secara teologis, orang miskin harus tunduk pada nasibnya karena kemiskinan dianggap sebagai kehendak Allah; secara meritokratis, orang miskin harus tunduk pada nasibnya karena kemiskinannya dianggap sebagai kesalahannya sendiri. Keduanya menyelamatkan struktur ekonomi dan politik yang timpang dari vonis bersalah.

Meritokrasi dan Kegagalan Politik Progresif

Sandel berpendapat, prinsip meritokrasi telah meracuni politik dan demokrasi kita

selama lebih dari empat dekade. Namun prinsip inilah yang sekarang dihidupi politik progresif liberal, partai kiri di Amerika dan Eropa, dan partai-partai sosial demokratik di banyak negara. Mereka menanggapi ketidaksetaraan yang menajam bukan dengan mempertanyakan ketidakadilan struktural melainkan dengan memperbesar retorika mobilitas ke atas, perluasan peluang yang fair, tanggung jawab individual, dan prestasi. Itulah sebabnya, mereka menyuruh orang-orang pergi dan belajar ke universitas dan mendapatkan gelar sarjana sebagai kunci menghadapi ketidaksetaraan.

Mereka buta terhadap kenyataan bahwa di banyak negara, populasi para pekerja tanpa ijazah universitas jauh lebih banyak. Bertumpu pada asumsi meritokratis, mereka gagal mengakui nilai kerja keras para buruh tanpa ijazah ini. Mereka gagal bertanya: mengapa mereka yang juga pekerja keras, banting tulang sepanjang tahun, tidak juga naik ke posisi kelas menengah atau lebih dari itu? Mengapa hidup mereka tetap miskin?

Menurut Sandel, salah satu benang merah yang menghubungkan populisme di berbagai negara adalah kegagalan politik progresif partai-partai kiri dalam menghadapi fakta ketimpangan akibat globalisasi selama empat dekade terakhir. Keberhasilan populisme sayap

kanan adalah buah kegagalan politik progresif atau politik sosial-demokratik. Alasan kegagalan ini adalah selama lebih dari empat dekade, partai-partai sosial-demokratik terjebak dalam perangkap neo-liberal dan kapitalisme. Hal ini menyimpang dari misi tradisional mereka: menjadi kekuatan penyeimbang dalam demokrasi menghadapi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh kapitalisme tak terkendali, dan menjadi jembatan bagi masyarakat kecil dalam mewujudkan keadilan sosial.

Di Amerika dan Eropa, selama lebih dari empat dekade terakhir, partai-partai sosial-demokratik gagal menjadi antagonisme neo-liberalisme, dan malah menerima kekuatan neo-liberal ke dalam sepak terjang politik mereka dengan sepenuh hati. Mereka tidak menerima secara kritis premis tentang kemahakuasaan pasar yang dilontarkan Reagan dan Thatcher beberapa dekade lalu: "Mekanisme pasar adalah alat utama mewujudkan kebaikan publik." Mereka merangkul proyek globalisasi pasar dengan sepenuh hati.

Seperti Marx dan kaum Marxis, Sandel melakukan kritik fundamental terhadap hegemoni pasar dan neoliberalisme dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Sandel berpendapat, jurang ketidaksetaraan yang menajam menunjukkan bahwa komersialisme

atau ekspansi tanpa batas mekanisme pasar merusak gagasan tentang solidaritas dan kebersamaan sebagai warga dari komunitas nasional yang sama. Bagaimana hal itu terjadi? Jawaban Sandel adalah: "Kesenjangan yang terlalu besar antara kaya dan miskin merusak solidaritas yang dibutuhkan oleh kewarganegaraan demokratis. Begini hal itu terjadi: Saat ketidaksetaraan makin tajam, orang kaya dan miskin menjalani kehidupan yang semakin terpisah. Orang kaya mengirim anak mereka ke sekolah-sekolah elit, sedangkan sekolah-sekolah umum di pinggiran kota disediakan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tak memiliki pilihan lain. Kecenderungan yang sama mengarah pada lembaga dan fasilitas publik lainnya. Klub kesehatan swasta menggantikan pusat rekreasi kota dan kolam renang. Komunitas perumahan kelas atas menyewa penjaga keamanan swasta sehingga tidak terlalu bergantung pada perlindungan polisi publik. Mobil pribadi menghilangkan kebutuhan untuk bergantung pada transportasi umum. Dan seterusnya. Orang kaya semakin memisahkan diri dari tempat dan layanan publik, menyerahkannya kepada mereka yang tidak bisa membayar apapun."

Dengan demikian, saya sepakat dengan pendapat bahwa Sandel seorang Marxis: kritik Sandel terhadap dominasi

pasar dan ketidaksetaraan selaras dengan kritik Marx terhadap kapitalisme atau kritik para Marxis terhadap neo-liberalisme. Meskipun perspektif para Marxis tentang neo-liberalisme sangat beragam yang mencerminkan keragaman Marxisme itu sendiri, mereka sepakat pada pandangan bahwa neo-liberalisme adalah perluasan dan penajaman kekuatan dan hubungan pasar di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Atau mereka sepakat bahwa istilah neo-liberalisme menunjuk pada serangkaian kebijakan dan praktek ekonomi serta teori yang membenarkannya dengan klaim bahwa solusi dari semua masalah adalah pasar. Jadi, apa yang disebut neo-liberalisme oleh kaum Marxis adalah apa yang disebut Sandel dengan istilah marketisasi. Keduanya memiliki arti yang sama: mengubah semua tindakan manusia berdasarkan mekanisme pasar. Neoliberalisme, sama seperti marketisasi, mensyaratkan apa yang disebut Sandel sebagai "komodifikasi segalanya". Baik tujuan maupun objek kritik Sandel dan para Marxis sama: objeknya adalah masyarakat yang didominasi pasar dan tujuannya adalah menantang dan membatasi dominasi pasar.

Komodifikasi segala-galanya itu juga tampak dalam marketisasi jabatan-jabatan publik yang secara moral seharusnya tidak boleh disentuh oleh

penalaran dan mekanisme pasar. Menurut Herry Priyono, mekanisme pasar yang menyasar dan bersarang pada lembaga-lembaga negara adalah salah satu fokus definisi korupsi. Jabatan publik dijadikan sebagai komoditas: diperoleh melalui transaksi jual-beli. Korupsi di sini berarti seorang pegawai pemerintah menganggap jabatan publiknya sebagai bisnis yang dikeruk demi keuntungan maksimal. Besarnya perolehan bergantung pada situasi pasar, dan kecerdikannya untuk memaksimalkan perolehan bergantung pada kurva permintaan publik. Artinya birokrasi dan jabatan berhenti sebagai mandat publik karena telah menjadi pasar bebas. Mekanisme pasar menguasai jabatan publik yang alasan adanya bukanlah pasar bebas.

Berhadapan dengan ketidaksetaraan yang makin tajam sejak 1990-an hingga saat ini, partai-partai kiri (sosial-demokratik) mengkampanyekan jalan keluar yang justru semakin melebarkan jurang ketidaksetaraan: "Jika Anda ingin menang dalam persaingan global, pergi dan belajar ke universitas." Mereka buta dengan fakta bahwa tidak ada universitas dan lembaga pendidikan hari ini yang bebas dari moncong neo-liberalisme. Sebagaimana disaksikan Sandel, Janji-janji meritokratis ini sekarang ini justru ditawarkan oleh partai-partai kiri demokratik.

Ini menjelaskan, mengapa partai-partai kiri yang semula bertumpu pada rakyat kecil dan para buruh sebagai basis massanya, sekarang ini malah diisi dan dikerumuni oleh elit-elit oligarkis.

Partai-partai ini telah kehilangan misi progresif dan "kiri"-nya, dan mereka tidak lebih baik dari partai kanan konservatif yang korup dan oligarkis. Inilah juga alasannya, mengapa kita tidak atau jarang melihat populisme kiri; mengapa hanya ada atau sering muncul populisme sayap kanan yang memanfaatkan sentimen ras, agama, anti-asing, hypernasionalisme, dll? Jawabannya: partai-partai kiri (sosialdemokratik) hanya tinggal nama. Sejatinya mereka telah berubah menjadi partai neo-liberal.

Meritokrasi dan Reaksi Populis

Dari berbagai keterangan di atas, posisi Sandel jelas yaitu krisis demokrasi dalam rupa bangkitnya populisme kanan di Amerika, Inggris, Polandia, Rusia, dan banyak negara demokrasi lainnya berakar pada ideologi meritokrasi. Dengan basis argumentasi ini, Sandel berpendapat bahwa antipati meritokratis memainkan peran penting dalam pemilihan Trump pada 2016 dan fenomena Brexit di Inggris.

Berbagai ulasan menyebutkan, Trump bukanlah seorang kandidat yang simpatik. Polling pendapat memperlihatkan, masyarakat Amerika secara

sempurna sadar akan kecacatan karakternya. Tapi Trump berhasil mengkomunikasikan suatu empati yang brutal kepada mereka, yang berakar bukan pada statistik, data empiris, atau informasi yang cermat, tapi pada bakat kemarahan yang tak terhalangi, ketidaksabaran, provokasi, kepandaian menghasut dan memplintir kebencian, dan sikap anti demokrasi. Bertentangan dengan berbagai analisis yang menyoroti fitur-fitur jelek Trump dan pendukungnya tersebut, Sandel justru lebih menyoroti kegagalan politik progresif partai liberal kiri Amerika (Demokrat) sebagai alasan yang tepat dari fenomena bangkitnya populisme. "Pemilihan Trump", tulis Sandel, "adalah vonis marah terhadap meningkatnya ketidaksetaraan ... dan pendekatan teknokratis terhadap politik yang tuli terhadap nada kebencian orang-orang yang merasa ekonomi dan budaya telah menelantarkan mereka."

Seperti diulas sebelumnya, meritokrasi menimbulkan penghinaan dan krisis pengakuan sosial bagi kelompok masyarakat yang merayap di bawah. Sandel berpendapat, ideologi meritokrasi adalah pedang bermata dua: mengilhami kesuksesan di satu sisi tetapi bersifat jahat dan merusak di sisi lain. Gagasan ini memberi selamat kepada para pemenang di satu sisi,

tapi menghina mereka yang kalah dan tertinggal di sisi lain. Sandel menjelaskan, politik penghinaan (*politics of humiliation*) yang dimainkan Trump jauh lebih berat daripada politik ketidakadilan (*politics of injustice*). Protes terhadap ketidakadilan hanya mengandung keluhan terhadap sistem yang telah dicurangi oleh para pemenang dan membuat mereka yang merayap tidak bisa bangkit. Namun, protes terhadap penghinaan jauh lebih sulit secara psikologis. Ini menggabungkan kebencian terhadap elit di satu sisi dan keraguan diri yang mengganggu: mungkin yang kaya menjadi kaya karena mereka lebih pantas dari orang miskin; mungkin orang miskin layak miskin karena kesalahan mereka sendiri.

Berbeda dari Hillary Clinton yang berbicara tentang prestasi, mobilitas ke atas, dan retorika meritokratis lainnya, menurut Sandel, Trump tidak berbicara demikian. Trump tidak menawarkan slogan meritokratis apapun selama pencalonan dan selama menjadi presiden. Sebagai gantinya, Trump menawarkan pembicaraan terus terang tentang pemenang dan mereka yang kalah, dan berjanji akan membuat Amerika kembali berjaya. Namun janji Make America Great Again ini tidak terkait dengan wacana meritokratis yang memenuhi agenda politik progresif liberal (kubu Demokrat) selama

empat dekade terakhir. Janji ini berisikan penegasan identitas, kedaulatan nasional, anti-globalisasi dan anti-elit.

Politik penghinaan, kebencian dan kemarahan yang dimainkan Trump menarik simpati sebagian besar buruh tanpa gelar sarjana karena menyapa kecemasan mereka. Kecemasan ini terkait dengan kemerosotan ekonomi para pekerja yang memburuk selama empat dekade terakhir. Pada 1971, 90% kelompok pekerja kulit putih memiliki lapangan pekerjaan yang baik. Pada 2016, angka itu menurun menjadi 80%. Pada tahun 2017, tersisa 68% kaum buruh tanpa ijazah universitas yang bekerja. Sebanyak 20% dari mereka menjadi penganggur karena sulit mencari pekerjaan. Mayoritas kaum buruh kehilangan harapan. Mereka merasa bahwa ekonomi pasar



bebas telah menghancurkan masa depan mereka. Tidak sedikit orang yang bunuh diri karena putus asa. Mereka hidup dalam suasana yang digambarkan Sandel sebagai “kematian karena kehilangan harapan”. Diperparah oleh wacana meritokrasi yang digaungkan elit politik liberal kiri (Demokrat), keadaan ini semakin mendorong mayoritas buruh tanpa ijazah ini menyambut dengan simpatik permainan politik populis sayap kanan Trump.

Tetapi Sandel mengingatkan, kemarahan moral para pendukung Trump ini tidak semata-mata bersifat ekonomis atau sebagai protes terhadap globalisasi dan teknologi yang menghilangkan pekerjaan mereka. Kemarahan ini juga bukan ekspresi rasisme, xenofobia, anti imigran dan antimultikulturalisme pendukung Trump. Kemarahan moral ini terutama berkaitan dengan krisis penghargaan sosial dan pengakuan publik terhadap martabat dan nilai kerja dari para pekerja yang tidak memiliki ijazah universitas. Ideologi meritokrasi menajamkan krisis penghargaan sosial ini ketika para pekerja dan mereka yang merayap di bawah harus memikul beban kegagalan mereka serta merasa para pemenang memandang mereka dengan hina.

Bagaimana dengan Indonesia?

Prinsip “prestasi adalah segala-

galanya” atau “prestasi adalah pendorong perubahan sosial” adalah prinsip yang diterima secara luas di Indonesia. Tampaknya di Indonesia meritokrasi bukan sebuah kekeliruan. Benarkah demikian? Jika kita menangkap inti gagasan Sandel, kita akan menemukan, meritokrasi jelas sebuah kekeliruan, yang bertentangan dengan karakter fundamental demokrasi kita. Sandel tidak mengatakan prestasi tidak penting. Yang ditolak Sandel adalah prestasi individual yang dilepaskan dari sumber daya sosial yang menghidupinya, sebuah prinsip individualistik yang menghancurkan solidaritas dan menimbulkan polarisasi sosial yang makin tajam antara kelompok yang bertengger di atas dan mereka yang merayap di bawah.

Dalam konteks Indonesia, mari kita melihat bahaya korosif meritokrasi bagi demokrasi: prinsip prestasi individual segala-galanya, atau mereka yang di atas pantas mendapatkan posisi mereka dan mereka yang merayap di bawah jelas salah sendiri, tidak sesuai dengan hakekat demokrasi kita yang mengedepankan “solidaritas” dan “keadilan sosial”. Meminta masyarakat untuk “kerja, kerja dan kerja”, atau menyuruh mereka menggapai pendidikan yang tinggi, tanpa memperhatikan struktur ekonomi, politik, dan pendidikan yang timpang karena disandera neo-

liberalisme, adalah sebuah seruan meritokratis yang menyakitkan mereka yang telah berjuang keras di jalan mereka namun tidak mengubah nasib.

Kita berhasil mempertahankan demokrasi di tengah keragaman etnik, agama dan ideologi. Namun bangunan demokrasi dan demokratisasi runtuh oleh fakta bahwa free movements of goods, capital, and labor tidak menghasilkan suatu ekuilibrium baru, tapi kesenjangan baru dengan dukungan penuh kaum plutokrat. Hanya orang kaya yang menguasai politik. Bahwa segelintir modal yang bisa menguasai harta yang menjadi milik 100 juta orang Indonesia menunjukkan plutokrasi menjajah demokrasi kita. Plutokrasi adalah akibat langsung dari menguatnya preferensi pasar dalam demokrasi, dan preferensi pasar ini semakin menajamkan ketidaksetaraan manakala prinsip meritokratis mereka yang mendarat di posisi atas pantas mendapatkan nasib mereka dan mereka yang merayap di bawah jelas salah sendiri juga memengaruhi cara pandang para elit politik terhadap kesenjangan sosial.

Sebagaimana Sandel, preferensi atau hegemoni pasar menyebabkan penyempitan ruang demokrasi atau ruang diskursus moral publik entah itu kewarganegaraan, bangsa atau agama. Wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh publik dan seharusnya

tidak boleh diintervensi pasar seperti DPR, pelayanan publik, media, sekarang ini didikte pasar. Kita bukan lagi warga negara melainkan sekadar “*homo economicus*” yang melayang-melayang dalam ruang kebebasan. Akibatnya, preferensi pasar menguasai semua ruang hidup masyarakat. Di bawah cengkeraman pasar, didukung paham *enuncumbered-self liberal*, negara ingin menghapus “hak-hak kolektif” atau “hak-hak komunitas partikular” yang ditekankan kaum komunitarian. Kita melihat tendensi itu misalnya dalam pencaplokan hak-hak masyarakat adat atas tanah oleh negara demi kepentingan neo-liberal yang dibungkus ilusi kemajuan sosial. Bukan hanya itu, perjuangan masyarakat sipil atas hak-hak kolektif di berbagai tempat mendapat perlawanan dan kekerasan dari instansi raksasa bernama negara.

Dengan kata lain, kita di Indonesia mengalami kegagalan politik progresif, yaitu politik yang secara serius berpihak pada masyarakat bawah dan isu keadilan sosial. Suasannya malah jauh lebih parah. Bukan saja partai progresif dan kiri demokratik tidak ada, atau semua partai jelas-jelas bermuka dan berotak neo-liberal dan kapitalis, melainkan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang mendesiminasikan pemikiran-pemikiran kiri juga mendapatkan ancaman dan

kekerasan dari pemerintah. Buku-buku kiri yang secara orisinal bicara tentang Marxisme dibredel dan dibakar. Berbagai kemungkinan lahirnya gerakan-gerakan kiri yang menentang status quo dan arogansi elit justru dianggap komunis. Rezimnya malah antikritik dan bahkan bereaksi keras terhadap mural. Kritik dianggap sebagai pelecehan terhadap kekuasaan dan yang lebih buruk pelecehan terhadap Presiden sebagai simbol negara (sejak kapan Presiden adalah simbol negara?). Suara protes masyarakat tidak ditanggapi serius, malah dibungkam dengan kekerasan, atau dihadang dengan menyodorkan dengungan jelek *buzzer-buzzer* penjilat istana.

Alhasil, energi antagonisme hampir tidak ada dalam politik dan demokrasi Indonesia saat ini. Hampir semua partai mengerumuni kekuasaan. Hanya satu dua yang berani keluar menjadi oposisi, tapi juga oposisi yang gagal mengangkat isu keadilan sosial secara argumentatif, dan malah lebih banyak mengumbar politik identitas. Bukankah selama rezim Soeharto, demokrasi kita juga kehilangan antagonisme di bawah cakar otoritarian? Jadi, dalam wajah berbeda, demokrasi kita hari-hari ini juga sama muram dan sangarnya dengan wajah otoritarianisme Soeharto selama 32 tahun memerintah. Tak heran, berbagai survei internasional menunjukkan indeks demokrasi kita kian merosot.

Tahun lalu, Ben Bland, seorang peneliti dari *Lowy Institute-Australia* menulis sebuah buku menarik tentang Jokowi. Bukunya berjudul *Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia* (2020). Buku ini berbicara tentang kontradiksi gaya kepemimpinan politik Jokowi yang terjebak pada janji perbaikan demokrasi di satu sisi dan semakin menguatnya oligarki, otoritarianisme, dan politik dinasti di sisi lain. Dia berjanji untuk mengadvokasi toleransi dan pluralisme agama, tapi pada akhirnya terkooptasi di dalam cengkeraman kekuatan Islam konservatif. Tentang itu, Bland menulis: *The president is caught between the promise of democracy and the deep roots of authoritarianism in Indonesia. Jokowi has made economic growth the centrepiece of his administration. But he has been unable to square the desperate need for foreign investment with a culture of protectionism and scepticism towards economic liberalisation. He has attempted to advocate for religious tolerance and diversity. But he has ended up co-opting, or being co-opted by, the forces of conservative Islam.*

Bland juga memperlihatkan bahwa pada awalnya Jokowi berjanji akan menjinakkan gurita oligarki yang telah menguasai Indonesia sejak Soeharto, yang melahap kekayaan dan sumber daya alam Indonesia, merusak birokrasi, dan menipu rakyat.

Indonesia baru di bawah kepemimpinan Jokowi akan maju dengan perbaikan ekonomi yang memadai, demokrasi yang membaik, dan keadilan sosial bagi semua. Janji ini dipertegas lagi saat terpilih pada tahun 2019. Namun, menurut pengamatan Bland, semua janji Jokowi ini pudar di periode kedua kepemimpinannya karena Presiden yang disebut lahir dari rahim warga sipil di luar lingkaran oligarki itu justru telah menjadi sangat tertanam pada politik oligarkis.

Menurut penelitian Bland, gaya blusukan Jokowi merupakan sebuah gaya yang sangat populis tapi sebetulnya tidak terlepas dari sokongan kekuatan oligarki di belakangnya. Bland menulis: *Blusukan is emblematic of one key element in Jokowi's political rise: his talent for retail politics. The other element is his ability to corral local, and then national, elites behind him. The tycoons, party bosses, religious leaders, and generals have brought him the money, political connections, and endorsements he has needed to capitalise on his connection to ordinary voters.*

Blusukan adalah strategi politik Jokowi yang sederhana dan pragmatis. Akan tetapi, pemahaman terlampau sederhana dan pragmatis tentang politik itu justru membuat kepemimpinan Jokowi disandera oleh oligarki, taipan, bos partai,

konglomerat, dan pemimpin agama. Hal ini membuat janji keberpihakan pada rakyat kecil tidak sepenuhnya terlaksana, dan malah sebaliknya politik transaksional, korupsi, radikalisme agama dan perampasan hak-hak kolektif warga semakin menjadi-jadi.

Kita melihat bahwa populisme pragmatis Jokowi telah bergerak dari demokrasi menuju otoritarianisme dan politik dinasti. Alih-alih memerangi korupsi, membersihkan birokrasi dan menjinakkan oligarki, kepemimpinan Jokowi justru memperkuat oligarki dan membangun dinasti politik baru. Menurut Bland, Jokowi secara tak sengaja menghidupkan kembali struktur pemerintahan Orde Baru, meraih kekuatan praktis apapun yang membantu mencapai tujuannya dan menjadi salah satu penjaga demokrasi yang buruk. Gagasan kepemimpinan Jokowi yang terlampau populis dan pragmatis tentang demokrasi membuat kualitas demokrasi semakin menurun. Selama kepemimpinan Jokowi, demokrasi lebih dipahami sebagai "cara memberi manfaat ekonomi dan sosial" daripada menjunjung tinggi hak-hak sipil dan kebebasan. Kritik Sandel di atas berlaku: suatu rezim yang memperlakukan politik secara teknokratis di bawah kendali segelintir teknokrat, rezim seperti itu tidak peduli pada argumen moral substansial yang melibatkan demos. Cepat atau lambat, rezim itu

jadi totaliter dan merusak demokrasi.

Pandangan populis dan pragmatis tentang demokrasi tersebut membuat demokrasi semakin tergerus di bawah kekuasaan oligarki, konglomerasi, taipan politik, bos partai, dan elit-elit korup. Gagasan pragmatis ini juga menyebabkan kemerosotan jaminan akan kebebasan sipil dan hak bersuara meskipun pemilihan umum atau pilkada yang kompetitif dilakukan secara rutin. Menguatnya politik Islam yang fundamentalistik dan anti-pluralis, penurunan kualitas demokrasi, ancaman terhadap kebebasan sipil, pelemahan KPK, represi terhadap oposisi, munculnya produk undang-undang kontroversial seperti UU Cipta Kerja, serta menguatnya oligarki dan politik



dinasti menunjukkan bahwa seorang aktor populis telah bergeser dari politik progresif yang memperjuangkan keadilan sosial bagi rakyat kecil kepada dukungan terhadap oligarki dan bahkan menjadi aktor baru di dalam politik oligarki.

Revitalisasi Diskursus Publik

Untuk keluar dari situasi ini, Sandel menawarkan revitalisasi diskursus publik yaitu peninjauan kembali premis-premis dasar liberalisme kontemporer. Sandel kembali menekankan pentingnya perdebatan tentang konsep hidup baik di ruang publik guna menjawab tantangan populisme kanan yang mengisi ruang publik dengan wacana intoleran, xenofobia, dan nasionalisme sempit. Dengan kalimat lain, mengatasi tirani meritokrasi, Sandel berusaha membawa kembali moralitas ke dalam politik dan solidaritas ke dalam demokrasi. Dia ingin menghidupkan kembali diskursus Aristotelian tentang "kehidupan yang baik". Maka, menurutnya, filsafat politik harus masuk ke dalam perdebatan seputar penilaian-penilaian moral substantif dan nilai-nilai yang diyakini para warga negara. Dengan itu, politik menjadi ruang diskursus etis yang terbuka bagi semua warga.

Sandel juga menekankan pentingnya perbaikan sistem politik yang memberi pengakuan sosial bagi martabat dan makna kerja.

Bagi Sandel, pandemi yang tak kunjung pergi ini membuka mata kita terhadap nilai kerja keras dan martabat pekerjaan semua orang. Dalam opininya, *"Are We All in This Together?"* yang dimuat di New York Times, Sandel berpendapat: "Banyak pekerja penting selama krisis ini [pandemi-pen.] melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan gelar sarjana; mereka adalah pengemudi truk, pekerja gudang, tukang pos, petugas keamanan, pemadam kebakaran, petugas kesehatan, kasir supermarket, asisten perawat, petugas rumah sakit dan penyedia perawatan di rumah. Mereka tidak memiliki kemewahan bekerja dengan aman dari rumah mereka dan mengadakan pertemuan melalui Zoom. Mereka, bersama para dokter dan perawat yang merawat orang-orang yang menderita di rumah sakit yang penuh sesak, adalah orang-orang yang mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan mereka sendiri sehingga kita semua tetap memenuhi berbagai kebutuhan dasar kita dengan tetap terlindung dari penularan. Selain berterima kasih kepada mereka atas layanan mereka, kita harus mengatur ulang ekonomi dan masyarakat kita untuk memberikan kompensasi dan pengakuan kepada para pekerja tersebut yang mencerminkan nilai sebenarnya dari kontribusi mereka – tidak hanya dalam keadaan darurat tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari."

Pengakuan akan martabat kerja

penting karena keluhan-keluhan masyarakat tertekan ini tidak bersifat ekonomis semata yang dianggap bisa diselesaikan oleh pasar, tidak hanya soal upah, pekerjaan dan keadilan distributif, melainkan juga tentang penghargaan sosial. Dengan demikian, para elit politik tidak menganggap reaksi populis sebagai sesuatu yang jahat, melainkan ditanggapi secara serius sebagai keluhan dan kemarahan moral terhadap suatu jenis politik yang meninggalkan tujuan utamanya: kebaikan bersama. Dalam konteks itu, populisme sebagai kemarahan moral dapat memberantas ketimpangan struktural dan plutokrasi.

Kritik dan pemikiran Sandel tersebut sangat relevan untuk Indonesia, selain karena krisis demokrasi yang diuraikan Sandel juga terjadi di Indonesia, tetapi juga karena gagasannya amat cocok dengan praktek demokrasi kita yang memberi tempat yang luas bagi nilai-nilai multikultural sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila. Sejak reformasi, Indonesia menghidupi demokrasi liberal. Namun, berkat kecerdasan para pendiri negara yang dahulu berdebat sengit tentang bentuk demokrasi yang ideal, demokrasi liberal berjalan bersamaan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan etika publik, sebuah sintesis dari paham hak atau keadilan dan konsep hidup baik. Pancasila adalah basis etis bagi masyarakat Indonesia yang plural dalam mewujudkan

tujuan bersama, sekaligus mencegah bahaya privatisasi konsep hidup baik seperti yang terjadi dalam masyarakat liberal. Dengan demikian, Pancasila adalah sebuah basis filosofis yang menampung ide tentang "hak-hak kolektif", solidaritas, partisipasi publik yang luas, masyarakat warga, wacana publik yang kuat secara moral, untuk menangkal efek korosif meritokrasi dan jebakan neo-liberalisme.

Penutup

Sandel memberikan gagasan alternatif dalam membaca fenomena krisis demokrasi dewasa ini. Bagi Sandel, tirani meritokrasi dan kegagalan politik progresif adalah akar krisis demokrasi dewasa ini. Tirani meritokrasi dan kegagalan politik progresif tidak terlepas dari pengandaian-pengandaian filosofis liberalisme, yang merupakan basis ideologis dari institusi-institusi demokratis modern di berbagai negara yang menghidupi demokrasi liberal. Karena itu, Sandel menawarkan revitalisasi diskursus publik yaitu peninjauan ulang premis-premis dasar liberalisme kontemporer. Gagasan Sandel relevan untuk konteks Indonesia dan memberikan perspektif baru dalam membaca fenomena krisis demokrasi bangsa ini. Gagasan komunitarian Sandel juga sejalan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila.